

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali, terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Sehingga, para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi serta cara pencegahan dengan cepat dan tepat, jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Dalam laporan keuangan ini, salah satu indikator untuk menilai performa suatu perusahaan adalah dengan memeriksa profitabilitas perusahaan tersebut (Harahap, 2022). Hal ini sejalan dengan konsep dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1* yang menyatakan bahwa informasi mengenai keuntungan (profit) umumnya menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan membantu pemilik perusahaan serta pihak lainnya untuk memproyeksikan kemampuan perolehan laba perusahaan di masa depan (Suheri et al., 2020).

Laba perusahaan merupakan sebuah alat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan potensi pendapatan jangka panjang, dan menilai risiko-risiko investasi. Meskipun semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memiliki nilai penting bagi para pemangku kepentingan, namun umumnya, fokus utama diberikan pada data laba.

Tabel 1.1 Pencapaian IKU “Penerimaan Pajak yang Optimal” DJP 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424,00 T	1.577,56 T	1.198,82 T	1.229,58 T	2.266,2 T
Realisasi	1.315,51 T	1.332,06 T	1.069,97 T	1.277,53 T	2.626,4 T
Capaian	92,23%	84,44%	89,25%	103,90%	115,61 %

Sumber : Laporan Kinerja (LAKIN) DJP 2018-2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 1.1, dapat disarikan bahwa selama periode dari tahun 2018 hingga 2020, pencapaian target pajak tidak pernah mencapai 95%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun, Indonesia tidak berhasil mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan target pajak akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang signifikan di Indonesia. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu melampaui target penerimaan pajak dengan lebih dari 100%, dan pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan sebesar 30,6%. Ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan harga komoditas yang tetap tinggi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Ada dugaan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi pencapaian target pajak setiap tahun, dengan tahun 2020 mencatatkan angka terendah, tahun 2017 hingga 2019 mengalami fluktuasi, dan tahun 2021 hingga 2022 berhasil mencapai target yang diharapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Menurut (Assih dan Gundono, 2000) Manajemen menyadari betapa pentingnya informasi keuntungan, sehingga mereka cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak semestinya, yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan informasi dalam kerangka teori agensi. Dalam kerangka ini, setiap pihak, baik pemegang saham sebagai pihak utama maupun manajemen sebagai agen, memiliki kepentingan yang berbeda dan berusaha untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Hal ini mendorong manajer untuk melakukan manajemen keuntungan atau manipulasi atas informasi keuntungan (Suheri et al., 2020).

Menurut (Mulford dan Comisky, 2019), tindakan tersebut merupakan manipulasi aktif terhadap laba yang telah ditargetkan; Walker menggambarkan manajemen laba sebagai penggunaan kebijaksanaan manajerial dalam GAAP untuk memengaruhi pilihan akuntansi, pelaporan laba, dan keputusan ekonomi nyata guna mempengaruhi bagaimana peristiwa ekonomi yang mendasarinya tercermin dalam satu atau lebih ukuran pendapatan; sedangkan Healy melihatnya sebagai perubahan dalam laporan keuangan perusahaan oleh pihak internal dengan tujuan menyatukan beberapa pemangku kepentingan atau memengaruhi hasil

kontrak yang bergantung pada angka dalam laporan keuangan (Sutadipraja et al., 2019).

Pada kasus PT Garuda Indonesia (*Persero*) Tbk, perusahaan manufaktur tersebut mengumumkan pencapaian kinerja keuangan yang sangat baik pada tahun 2018, dengan mencatatkan laba bersih sebesar US\$ 809 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Namun, dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena mereka curiga terjadi kejanggalan dalam pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan 2018. Salah satu transaksi yang menjadi perdebatan adalah kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, sebuah perusahaan rintisan penyedia teknologi wifi on board, yang dianggap sebagai pendapatan oleh manajemen (Tambunan et al., 2022).

Secara kronologis, PT Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia, yang dianggap menguntungkan hingga US\$ 239,9 juta. Dalam kerja sama tersebut, Mahata berjanji untuk menanggung semua biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Namun, pada kenyataannya, PT Mahata belum membayar sepeser pun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, tetapi manajemen tetap mencatatnya sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat (Tambunan et al., 2022).

Akhirnya, laporan keuangan Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih. Namun, tindakan tersebut akhirnya terdeteksi oleh pihak regulator. Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya memberikan peringatan tertulis tingkat III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta meminta perusahaan untuk melakukan perbaikan dan menyajikan ulang laporan keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan menyajikan ulang laporan keuangan tahun 2018 (Tambunan et al., 2022).

Menurut Yahaya et al., (2020) Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh tim manajemen untuk memengaruhi atau mengelola laba yang dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode akuntansi tertentu atau mempercepat transaksi pengeluaran atau pendapatan, atau menggunakan metode lain yang dirancang untuk mempengaruhi laba jangka pendek. Tindakan yang dilakukan manajer ketika menggunakan pertimbangan dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan memiliki tujuan memanipulasi besaran laba kepada kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) tergantung pada angka-angka yang dihasilkan. (Fathihani & Wijayanti, 2022).

Perencanaan pajak dan manajemen laba memiliki keterkaitan yang erat dengan laporan keuangan dalam industri. Keuntungan yang tinggi dapat

menghasilkan beban pajak yang besar. Oleh karena itu, manajer industri sering menggunakan berbagai strategi manajemen laba untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan pajak dan manajemen laba saling terkait karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai target keuntungan dengan mengelola angka laba dalam laporan keuangan. Banyak tindakan yang dilakukan oleh industri untuk mengurangi pembayaran pajak, termasuk manipulasi aktivitas operasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah salah satu teknik dalam manajemen laba yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Rohman et al., 2022).

Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam pengelolaan pajak, umumnya berfokus pada upaya meminimalkan kewajiban pajak. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk mengatur beban pajak sedemikian rupa sehingga dapat dikurangi sebanyak mungkin, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak, dan ini dilakukan dengan berbagai metode, baik yang sesuai dengan aturan perpajakan maupun yang mungkin melibatkan pelanggaran peraturan perpajakan (Pardede & Tinambunan, 2022).

Penghasilan yang diterima oleh individu atau entitas di Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1

Ayat 1, pajak diartikan sebagai tanggung jawab kontribusi yang harus diserahkan kepada perusahaan, yang diatur oleh undang-undang dan diperlukan untuk mendukung kemakmuran rakyat, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Di sisi lain, dalam bidang akuntansi, ada proses pencatatan transaksi ekonomi berdasarkan siklus akuntansi yang menganalisis dan merangkum laporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan.

Secara konseptual, dalam model akuntansi berbasis akrual, terdapat dua komponen utama yang digunakan dalam laporan keuangan, yaitu komponen kas dan komponen akrual. Alasannya adalah karena perusahaan sering melakukan dua jenis transaksi dalam operasinya, yaitu transaksi kas (tunai) dan transaksi non-kas (non-tunai). Komponen kas merupakan bagian yang sulit untuk dimanipulasi karena mencerminkan jumlah kas yang sebenarnya diterima oleh perusahaan dalam periode tertentu. Dalam hal ini, transaksi komponen kas harus didukung oleh bukti berupa uang atau bentuk lain yang setara dalam jumlah yang sama, yang secara fisik dapat dipastikan ada.

Di sisi lain, transaksi akrual adalah jenis transaksi yang tidak perlu disertai dengan uang atau bentuk setara. Dalam transaksi ini, individu tidak harus menunjukkan bukti fisik berupa sejumlah uang yang diterima atau dikeluarkan untuk mencatat besarnya nilai transaksi tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi praktik manajemen laba adalah Beban Pajak Tangguhan. Beban Pajak Tangguhan merujuk pada biaya yang muncul akibat perbedaan dalam periode antara laba yang dicatat dalam

laporan keuangan untuk pihak eksternal dengan laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Kehadiran Beban Pajak Tangguhan memiliki dampak yang penting pada manajemen laba karena perbedaan sementara ini dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang dan mengakibatkan kewajiban pajak tangguhan. Oleh karena itu, manajer memiliki peluang untuk mengelola laba dengan mengatur besarnya Beban Pajak Tangguhan yang tercatat dalam laporan laba rugi (Fatchan Achyani dan Susi Lestari, 2019).

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang muncul karena adanya disparitas antara laba yang dicatat secara akuntansi (yakni laba yang tercantum dalam laporan keuangan untuk keperluan pihak eksternal) dan laba yang menjadi dasar perhitungan pajak (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Aprilia, Mahsuni, Mawardi, 2020, p. 84) menyatakan bahwa perhitungan beban pajak harus mematuhi ketentuan perpajakan yang mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal sebagai akibat dari perbedaan pendapat. Hal ini melibatkan konsep biaya, pengukuran biaya, dan alokasi biaya yang berbeda antara Pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan lainnya. Selisih antara laba komersial dan laba fiskal dapat memberikan informasi tentang keputusan yang diambil oleh manajemen selama proses akruasi (Devitasari, 2022).

Penelitian ini fokus pada perusahaan manufaktur karena Watts dan Zimmerman (1990), menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar

dengan tingkat pengaruh politik yang signifikan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mereka laporkan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar dan menghindari sanksi. Di Indonesia, sistem *self assessment* diterapkan, di mana wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak mereka sendiri. Tindakan ini bisa memberikan peluang kepada perusahaan manufaktur untuk mengurangi jumlah total pajak yang harus mereka bayarkan. Selain itu, sektor manufaktur juga memiliki dominasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), melibatkan industri dasar dan kimia, berbagai sektor industri, serta industri barang konsumsi (Devitasari, 2022).

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan analisis serta menguji secara praktis dengan menggunakan bukti empiris, yang melibatkan : **Pengaruh penggunaan Basis AkruaI dan Pajak Tangguhan terhadap Praktik Manajemen laba dengan Perencanaan Pajak sebagai Variabel Intervening.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Apakah penggunaan basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan?

2. Apakah penggunaan pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan?
3. Apakah penggunaan basis akrual berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
4. Apakah penggunaan pajak tangguhan berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan?
5. Apakah basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak perusahaan?
6. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan melalui perencanaan pajak?
7. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh basis akrual terhadap manajemen laba perusahaan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh basis akrual terhadap perencanaan pajak perusahaan.
4. Mengetahui dan menganalisis penggunaan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak Perusahaan.

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba Perusahaan melalui perencanaan pajak.
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba Perusahaan melalui perencanaan pajak.
7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya.

b. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya terkait dengan Pengaruh penggunaan Basis Akrual dan Pajak Tangguhan Terhadap Praktik Manajemen Laba dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Intervening.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh terutama dari bidang ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penggunaan basis akrual dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat lainnya yang penulis harapkan adalah kesempatan dalam mempelajari materi materi yang didapatkan selama perkuliahan.

b. Bagi Investor

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan manajemen laba serta tanggung jawab perusahaan dalam perencanaan pajaknya untuk membantu investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

c. Bagi Perusahaan

Adanya penelitian ini dapat memberikan indikasi bahwa perusahaan perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan khususnya dalam urusan perpajakan, agar dapat melakukan manajemen laba karena berdampak sangat luas terhadap kinerja perusahaan

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Dalam penelitian ini, sistematika penulis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah secara teoritis, empiris, dan normatif, beserta alasan-alasan yang mendukung perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui analisis data. Bab ini juga mencantumkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Selain itu, bab ini juga membahas permasalahan yang akan diteliti serta menjelaskan hubungan antar variabel yang akan dianalisis. Teori yang relevan mencakup bidang akrual, pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan manajemen laba. Bab ini juga mencantumkan tinjauan teoritis, tinjauan empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini menjelaskan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Penjelasan meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel yang digunakan, dan cara pengukuran. Bab ini juga mencakup informasi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, dan metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan data statistic mengenai variabel independent dan variabel dependen yang telah digunakan. Selain itu, juga dibahas tentang pengujian yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 25 dari penjelasan hasil analisis data. Bab ini juga mencakup penafsiran hasil penelitian yang mencantumkan solusi untuk permasalahan yang diajukan, serta mencatat berbagai kendala yang dihadapi dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Kesimpulan diambil dan ditampilkan sebagai gambaran dari seluruh hasil penelitian. Saran diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.